

MUHAMMADIYAH DAN MASYUMI DI YOGYAKARTA, 1945-1960¹

Suwarno

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail: suwarnopurwokerto@yahoo.com

Abstrak

Dalam periode 1945-1960, Muhammadiyah dan Masyumi memiliki hubungan yang sangat erat baik secara nasional maupun lokal di wilayah Yogyakarta. Bagi Muhammadiyah, Masyumi merupakan wadah saluran aspirasi politiknya, sementara bagi Masyumi, Muhammadiyah telah menjadi anggota istimewa yang sangat penting. Artikel ini merupakan bagian dari disertasi yang terfokus pada pembahasan mengenai relasi Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, kiprah politik para tokoh Muhammadiyah yang menjadi aktivis Masyumi, dan keterlibatan Muhammadiyah dalam perjuangan Masyumi memenangkan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1945-1960 di Yogyakarta, Muhammadiyah merupakan gerakan sosial-keagamaan yang sebagian besar anggotanya terlibat dalam Partai Islam Masyumi. Ada adagium di kalangan warga Muhammadiyah pada waktu itu bahwa Masyumi sebagai tempat berjuang, sedangkan Muhammadiyah sebagai tempat beramal. Di Yogyakarta, sebagian besar tokoh Masyumi merupakan anggota Muhammadiyah. Kiprah politik para tokoh Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah cukup besar dalam pemerintahan dan parlemen. Keterlibatan Muhammadiyah secara organisasi ataupun melalui anggota yang menjadi tokoh Masyumi dalam Pemilu, baik Pemilu 1951, 1955 maupun 1957 membuat Masyumi berkembang sebagai salah satu partai yang diperhitungkan dalam arena politik di Yogyakarta.

Kata kunci: Muhammadiyah, Masyumi, Yogyakarta, politik

MASYUMI AND MUHAMMADIYAH IN YOGYAKARTA, 1945-1960

Abstract

In the period of 1945-1960, Muhammadiyah and Masyumi have a very close relationship, both nationally and locally in the region of Yogyakarta. For Muhammadiyah, Masyumi was a container of channel their political aspirations, while for Masyumi, Muhammadiyah has been a special member of very importance. This article is part of a dissertation focused on the discussion of the relationship Masyumi and Muhammadiyah in Yogyakarta, political contribution of their leaders who had become Masyumi activists, and Muhammadiyah's involvement in the fight Masyumi win the election. The method used in this research is the method of history, which includes four steps: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results showed that in the period 1945-1960 in Yogyakarta, Muhammadiyah was a socio-religious movement most of whose members were involved in Islamic Party Masyumi. There was a adage among residents of Muhammadiyah at the time that Masyumi as a place to struggle, while Muhammadiyah as a charitycontaine. In Yogyakarta, the majority of the Muhammadiyah members were Masyumi figures. The political contribution of Masyumi's political leaders came from Muhammadiyah was quite large in the government and parliament. The involvement of Muhammadiyah, institutionally or personally members have been prominent figures in Masyumi had made the Islamic party grew as a party has bargaining position in political arena at Yogyakarta, in particular at general election of 1951, 1955 and 1957.

Keywords: Muhammadiyah, Masyumi, Yogyakarta, politics

I. PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20, di Yogyakarta terdapat tiga organisasi yang memiliki pengaruh kuat dalam memajukan pendidikan modern dengan tidak melupakan akar sosio-kultural. *Pertama*, Budi Utomo (BU), sekalipun BU berdiri di Jakarta pada 1908, namun setahun kemudian pusatnya pindah ke Yogyakarta, dengan peran penting Mas Ngabehi Wahidin

Naskah masuk : 25 Juli 2015, revisi I : 15 Agustus 2015, revisi II : 25 Agustus 2015, revisi akhir : 30 Agustus 2015

¹ Artikel ini merupakan bagian dari Disertasi penulis pada Program Ilmu-ilmu Humaniora (Sejarah) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Soedirohoesodo, seorang pegawai kesehatan. Kedua, Muhammadiyah yang didirikan oleh Mas Ngabehi Muhammad Darwis atau Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan pada 1912. *Ketiga*, Taman Siswa yang berdiri pada 1922 dengan tokoh utamanya Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman. Melalui prakarsa ketiga tokoh dan organisasinya masing-masing tersebut, telah menjadikan Yogyakarta sebagai “pusat perkembangan kebudayaan dan pendidikan nasional” (Suwarno, 1994: 66).²

Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara.³ Ia ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dengan kata lain, Kyai Dahlan ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Berkenaan dengan itu, sejak awal K.H. Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, melainkan organisasi yang lebih bergerak di bidang agama, sosial dan pendidikan. Sekalipun demikian, ia tidak anti-politik sebagaimana ditunjukkan oleh keterlibatannya menjadi anggota Budi Utomo (BU)⁴ sejak 1909, Jam'iyat al Khair pada 1910, dan Sarekat Islam (SI) dalam 1911.⁵

Orientasi Muhammadiyah mengalami perubahan ke arah yang lebih politis di bawah kepemimpinan K. H. Mas Mansur (1937-1942). Salah satu latar belakang yang mendasari perubahan orientasi itu adalah terjadinya kevakuman dalam arena politik pergerakan kebangsaan pasca penangkapan dan pembuangan para tokoh pergerakan seperti Soekarno ke Ende, Flores, dan Moh. Hatta ke Boven Digul. Selain itu, ada desakan dari internal warga Muhammadiyah yang menghendaki Muhammadiyah lebih berperan dalam panggung politik nasional. Alasan lain, Mas Mansur merupakan tokoh yang memiliki kepribadian lebih melihat keluar (*outward looking*), sebaliknya kepribadian K.H. Ahmad Dahlan lebih cenderung melihat ke dalam (*inward looking*).

Dalam masa kepemimpinan Mas Mansur, Muhammadiyah tidak lagi sekedar mengembangkan dakwah Islamiyah dan memperluas sayap organisasi ini ke seluruh Indonesia, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah membuat Muhammadiyah menjadi organisasi yang semakin diperhitungkan baik di kalangan umat Islam sendiri, maupun juga di kalangan kaum nasionalis dan pemerintah kolonial Belanda. Kepeloporan Mas Mansur dalam membidani lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) pada 1937 dan memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) pada bulan Desember 1938, serta keterlibatannya dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tahun 1939 dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) tahun 1941 menunjukkan kiprah Muhammadiyah yang cukup besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia (Suwarno, 2010: 58-60).

² Sartono Kartodirdjo menyebut Yogyakarta pada awal abad ke-20 diliputi oleh semangat perubahan sosial dan kebangkitan nasional guna menjawab tantangan modernisasi. Tantangan tersebut berusaha dijawab melalui kehadiran tiga organisasi, yakni Budi Utomo (BU), Muhammadiyah dan Taman Siswa. Ketiganya memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Bedanya, BU merupakan semacam gerakan etno-nasionalisme yang dimotori oleh kaum priyayi intelektual, Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi keagamaan untuk mengantisipasi tantangan modernisasi di kalangan kaum religius muslim perkotaan, dan Taman Siswa sebagai gerakan untuk menyelamatkan dan mengadaptasikan budaya Jawa di tengah derasnya arus modernisasi untuk kalangan priyayi dan rakyat Jawa pada umumnya. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Multi-dimensi Pembangunan Bangsa dan Etos Nasionalisme Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 103-113.

³ Weinata Sairin menyebut Muhammadiyah sebagai “pengemban dan pengembang gagasan Kiyai Ahmad Dahlan.” Baca selengkapnya dalam Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 50.

⁴ BU yang sampai sekarang dipandang sebagai pelopor kebangkitan nasional didirikan oleh para siswa STOVIA Jakarta seperti Soetomo, Soeradji, dan beberapa teman yang lain setelah mendapatkan masukan dan saran dari dr. Wahidin Soedirohoesodo pada 20 Mei 1908. Bahkan kantor pusat BU kemudian dipindah ke Yogyakarta agar dekat dengan rumah tinggal dr. Wahidin dan karena Yogyakarta merupakan lambang kesatuan Jawa. Lihat Anonim, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Boedi Oetomo*, (Jakarta: Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI, 1995), hlm. 9-19.

⁵ Menurut Alwi Shihab, keterlibatan Kiyai Dahlan dalam tiga organisasi tersebut adalah karena Kiai Dahlan sangat tertarik dengan intelektualisme keagamaan yang dikembangkan oleh Jami'at al Khair, revivalisme kebudayaan yang dilakukan oleh BU, dan antusiasme politik yang digairahkan oleh SI. Baca Alwi Shihab, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 113.

Peran Muhammadiyah dalam konteks kehidupan sosial-politik pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan pasca-kemerdekaan, khususnya masa Revolusi Fisik (1945-1949) relatif cukup besar. Peran tersebut dapat dirumuskan dalam empat indikator sebagai berikut (Abror, 2010: 42-46). *Pertama*, saat Jepang menduduki Indonesia berlaku kebiasaan *seikirei*, yakni penghormatan kepada kaisar Jepang, *Tenno Heika*, dengan cara membungkuk seperti gerakan ruku' dalam shalat ke arah matahari terbit. Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah periode 1942-1953, menganggap *seikirei* mengarah kepada *syirik* (perbuatan menyekutukan Allah), sehingga beliau tidak mau melakukan hal itu. Akibatnya, beliau dipanggil untuk menghadap Kepala Badan Intelijen Jepang di Yogyakarta, Kolonel Tsuda. Di depan Kolonel Tsuda, Ki Bagus mempertahankan pendapatnya untuk tidak melakukan *seikirei* karena alasan keagamaan, dan ternyata pihak Jepang mau memahami.⁶

Kedua, keterlibatan secara aktif beberapa tokoh Muhammadiyah dalam persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, K.H. Mas Mansur termasuk dalam jajaran empat tokoh serangkai yang mewakili bangsa Indonesia pada 1944 bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Ki Bagus Hadikusumo ikut diundang oleh Kaisar Jepang ke Tokyo pada bulan Februari 1945 bersama-sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ki Bagus Hadikusumo dipandang sebagai salah seorang tokoh yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yakni sebagai anggota *Chuo Sangi In* (parlemen), anggota *Dokuritsu Zyunbi Tyo-sakai* (Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan) dan anggota *Dokuritsu zyunbi I-inkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan). Tokoh Muhammadiyah yang lain, K.H. Abdul Kahar Muzakir, dikenal sebagai salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945.⁷

Ketiga, Muhammadiyah terlibat secara aktif dalam upaya mendirikan Partai Islam Masyumi pada 7-8 November 1945 saat berlangsungnya Kongres Umat Islam yang diadakan di Gedung Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang aktif sebagai pengurus atau pimpinan Partai Masyumi, antara lain: Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Kahhar Muzakir, K.H. Faqih Usman, Mr. Kasman Singodimedjo, HAMKA, dan H.A. Malik Ahmad. Secara organisatoris, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya seperti PSII, PERSIS, NU, PERTI, dan lain sebagainya (Syaifullah, 1997: 141-142).

Keempat, ikut terlibat secara aktif dalam usaha mempertahankan dan membela kemerdekaan, khususnya di wilayah Yogyakarta. Setelah Belanda melancarkan agresi militer I pada bulan Juli 1947, para ulama Muhammadiyah di Yogyakarta bermusyawarah untuk membentuk lasykar Angkatan Perang Sabil (APS) guna melawan Belanda. Susunan pimpinan APS adalah Ki Bagus Hadikusumo (Penasihat), K.H. Mahfudh (Imam), K.H. Hadjid (Ketua), dan K.H. Ahmad Badawi sebagai Wakil Ketua (Abror, 2010: 45).

Pasca agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, APS keluar dari Kota Yogyakarta dan ikut melancarkan perang gerilya bersama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Markas APS di Sonosewu pernah diserbu oleh pihak

⁶ Sebenarnya tokoh Muhammadiyah yang berani menentang kebiasaan *seikirei* tidak hanya Ki Bagus Hadikusumo, tetapi juga Haji Rasul dan K.H. Mas Mansur. Haji Rasul, yang nama aslinya Haji Amrullah, ayah HAMKA, dalam pertemuan ulama dari seluruh Jawa di Bandung pada 1943 yang dipimpin oleh Kolonel Horie, di mana Haji Rasul akan dipromosikan sebagai pemimpin ulama tidak mau melakukan *seikirei* ketika semua yang hadir melakukannya. Pada pertemuan tanggal 23 Juli 1943 di kantor Pendidikan Jakarta yang dihadiri oleh Prof. Ozaki, Ir. Soekarno dan K.H. Mas Mansur, K.H. Abdul Kahhar Muzakir, R. H. Adnan, dan Ny. Siti Nurdjannah, Mas Mansur menyatakan bahwa umat Islam setuju bekerja sama dengan pihak Jepang dengan syarat Jepang tidak menghina agama Islam. Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hlm. 155-157.

⁷ Deliar Noer menyebut pengangkatan K.H. Mas Mansur dalam jajaran Empat Tokoh Serangkai bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta dan Ki Hajar Dewantara, sebagai "perkembangan yang unik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kaum nasionalis dan pihak Jepang sangat memahami betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam panggung politik Indonesia. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 24.

Belanda sehingga menimbulkan korban di pihak APS sebanyak 13 orang gugur mati syahid. Di antara yang gugur, adalah Zuhri (anak Ki Bagus Hadikusumo), Wildan (anak K.H. Muchtar), dan Jarid (putra dari K.H. Hadjid). Sementara yang selamat, antara lain Mohammad Diponegoro, yang belakangan dikenal sebagai sastrawan dan redaktur majalah Suara Muhammadiyah (Abror, 2010: 46).

Sampai saat ini masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji relasi antara Muhammadiyah dengan Masyumi, apalagi pada tingkat lokal seperti halnya di Yogyakarta. Pada tingkat nasional, ada dua penelitian yang dapat disebutkan di sini. Pertama, tesis Syaifullah (1997) yang menyimpulkan tiga pola relasi Muhammadiyah dan Masyumi: akrab dan mesra (1945-1955), renggang (1956-1959), dan akhir relasi (1960). Kedua, kajian Insan Fahmi Siregar (2008) menyoroti peran Masyumi dalam pemerintahan, yang menunjukkan adanya tiga pola sikap, yakni: sebagai partai yang kritis (1945-1949), partai pemerintah (1950-1956), dan sebagai partai oposisi (1957-1959).

Pada tingkat lokal Yogyakarta, kiranya perlu disebutkan dua buah penelitian yang menyinggung relasi antara Muhammadiyah dengan Masyumi, khususnya di daerah Kotagede. *Pertama*, kajian Mitsuo Nakamura (1983) mengenai pergerakan Muhammadiyah di Kotagede pada awal 1970-an dengan judul: "Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin," Meskipun kajian Nakamura lebih bernuansa antropologis ketimbang historis dengan memetakan aktivitas anggota-anggota Muhammadiyah dalam perdagangan dan industri, namun ia menyinggung partai Masyumi yang sebagian besar didukung oleh anggota-anggota Muhammadiyah. Pada 1950-1960 an, Nakamura mengemukakan fenomena kemerosotan Partai Masyumi dan perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin menonjol (Nakamura, 1983: 128-129). Kedua, penelitian Amini (2011) yang memperdalam kajian Nakamura dengan fokus semakin dominannya PKI di Kotagede yang notabene merupakan daerah santri dan basis massa Muhammadiyah serta pendukung Masyumi dalam tahun 1950-1960an.

Dalam kajian ini, diikuti pemikiran yang dikembangkan oleh Alfian bahwa Muhammadiyah telah memainkan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai pembaru keagamaan, agen perubahan sosial, dan sebagai kekuatan politik. Indikator utama Muhammadiyah sebagai pembaru keagamaan tampak pada karakter Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pemurnian agama sekaligus pembaruan dalam pengamalan keagamaan). Sebagai agen perubahan sosial ditunjukkan dengan mengembangkan pendidikan yang mengantarkan system dan metode baru. Sementara sebagai kekuatan politik, indikator utamanya tampak dari perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang semakin menonjol (Alfian, 1989: 5-6). Namun demikian, berbeda dengan kajian Alfian (1989: 6) yang mengamati Muhammadiyah sebagai kekuatan politik dari sudut pandang sebagai kelompok kepentingan, penulis lebih melihat Muhammadiyah dari kacamata sebagai bagian dari partai politik, dalam hal ini Masyumi karena posisi Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi.

Tulisan ini akan difokuskan pada relasi Muhammadiyah dan Masyumi dalam periode 1945-1960, khususnya di wilayah Yogyakarta. Relasi di antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Partai politik Islam Masyumi merupakan wadah saluran aspirasi politik resmi Muhammadiyah. Sementara itu, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi menjadi pendukung dan tulang punggung utamanya. Di samping itu, akan dibahas sejauh mana kiprah para tokoh Muhammadiyah yang sekaligus menjadi aktivis Masyumi dalam pemerintahan dan parlemen. Terakhir, akan dipaparkan keterlibatan Muhammadiyah dalam perjuangan memenangkan Masyumi lewat pemilu, yakni Pemilu 1951, 1955 dan 1957.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah

merupakan prosedur untuk menguji dan menganalisis rekaman-rekaman tertulis sezaman yang dilakukan secara cermat dan kritis (Gottschalk, 1985: 32). Penulis menggunakan metode sejarah tersebut untuk menganalisis dan merekonstruksi relasi Muhammadiyah dan Masyumi di wilayah Yogyakarta dalam periode 1945-1960. Lebih jauh, metode sejarah untuk menganalisis dan merekonstruksi relasi Muhammadiyah Masyumi di Yogyakarta itu ditempuh melalui empat langkah, sebagai berikut: *heuristik*, kritik, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 1990: 89-90).

Dalam *heuristik*, sedapat mungkin penulis lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan dokumenter yang berkaitan dengan Muhammadiyah, Masyumi, dan keadaan sosial-politik Yogyakarta sejak tahun 1945 hingga 1960. Pada langkah kritik, bahan-bahan dokumenter yang telah dikumpulkan dipilih dan dipilah dengan menguji aspek otentisitasnya (kritik ekstern) dan kredibilitas isinya (kritik intern). Selanjutnya, pada langkah interpretasi, penulis melakukan analisis dan sintesis, proses menjabarkan dan sekaligus menghimpun temuan-temuan yang telah disaring lewat kritik ekstern dan kritik intern. Terakhir, pada langkah historiografi, penulis berupaya merekonstruksi relasi Muhammadiyah Masyumi di Yogyakarta dalam periode 1945-1960 dalam bentuk tulisan yang bermakna.

II. RELASI MUHAMMADIYAH DAN MASYUMI

Masyumi merupakan partai Islam yang lahir pada 7 November 1945 di Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Masyumi pada 7 November 1945 sangat berdekatan dengan keluarnya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945. Maklumat tersebut memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik yang akan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat (Anonim, 1951a: 7). Tempat kelahiran Masyumi di Gedung Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta telah menunjukkan besarnya sumbangan Muhammadiyah dalam kelahiran Masyumi, dan belakangan Muhammadiyah menjadi tulang punggung Masyumi. Kantor pusat Masyumi pun berada di Yogyakarta sejak 7 November 1945 hingga 1 Februari 1950 baru dipindahkan ke Jakarta (Anonim, 1951a: 7).

Kelahiran Masyumi itu diputuskan dalam Kongres Muslimin Indonesia yang berlangsung di Madrasah Mua'limin Muhammadiyah Yogyakarta. Ada dua keputusan kongres: *pertama*, mendirikan Masyumi yang diikrarkan atau dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan *kedua*, Masyumi sebagai wadah saluran aspirasi dan kepentingan resmi yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia (Syaifullah, 1997: 141-142).

Keanggotaan Masyumi mencakup dua kategori, yakni: perseorangan, dan organisasi sebagai anggota istimewa. Anggota perseorangan minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah, memiliki hak suara, namun tidak dibenarkan merangkap sebagai anggota partai lain. Sementara anggota istimewa memiliki hak untuk memberikan nasihat atau saran. Gagasan untuk membedakan sifat keanggotaan Masyumi secara perseorangan dan organisasi itu didasari oleh pemikiran agar umat Islam terwakili dan anggota Masyumi bertambah banyak (Noer, 2000: 52; Syaifullah, 1997: 142).

Anggota Masyumi kategori organisasi sebagai anggota istimewa, pada awalnya (1945) hanya meliputi empat organisasi, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Ummat Islam. Muhammadiyah termasuk aliran pembaru, NU tradisional, dan dua yang terakhir termasuk tradisional dalam urusan agama namun bersikap

modern dalam soal dunia.⁸ Belakangan, dua organisasi yang terakhir itu melakukan fusi pada 1951 menjadi Persatuan Ummat Islam Indonesia. Setelah empat organisasi yang menjadi anggota istimewa Masyumi itu, kemudian menyusul Persatuan Islam (Persis) pada 1948 dan Al Irsyad dalam tahun 1950. Dua organisasi Islam di wilayah Sumatera Utara, Al Jamiyyatul Washliyah dan Al-Ittihadiyah juga masuk menjadi anggota istimewa Masyumi (Noor, 2000: 52).⁹

Perkembangan partai Masyumi periode 1945-1950 tergolong pesat. Hingga akhir 1950, tercatat ada 237 cabang, 1080 anak cabang, dan 4982 ranting Masyumi di seluruh Indonesia. Jumlah anggota Masyumi saat itu sekitar 10 juta orang. Namun selepas keluarnya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)¹⁰ pada tahun 1947 dan disusul kemudian NU dalam tahun 1952, perkembangan Masyumi cenderung statis. Berkaitan dengan keluarnya PSII dan NU tersebut, maka Masyumi tidak dapat disebut lagi sebagai satu-satunya partai politik Islam yang mawadahi, menyalurkan aspirasi dan kepentingan umat Muslim.

Susunan pengurus Partai Masyumi dalam tahun 1950, pasca-Muktamar ke-5 di Jakarta, meliputi empat bagian sebagai berikut. Bagian I Muktamar, dipimpin oleh Dr. Soekiman sebagai ketua, dibantu oleh dua orang, yaitu: Wakil Ketua I Mr. Kasman Singodimedjo, dan Wakil Ketua II Mr. Jusuf Wibisono. Bagian II Dewan Partai yang dipimpin oleh Dr. Soekiman sebagai Ketua, Wakil Ketua I Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua II Mr. Jusuf Wibisono, dan dibantu oleh anggota sebanyak 58 orang. Bagian III, Pimpinan Partai yang mencakup dua sub-bagian Dewan Politik dan Dewan Organisasi. Dewan Politik diketuai oleh Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua I, Mr. Mohammad Roem sebagai Wakil Ketua II, dibantu oleh 9 orang anggota. Dewan Organisasi terdiri atas, Prawoto Mangkusasmito sebagai Ketua dan dibantu oleh 7 orang anggota. Bagian IV, Sekretaris Pimpinan Partai terdiri atas K. Taufiqurrahman sebagai Sekretaris Umum, dibantu oleh Moh. Ngali Atmodiwirjo sebagai Sekretaris Departemen Organisasi, Sjarif Usman sebagai Sekretaris Departemen Penerangan, dan Djamaluddin Nagum sebagai Kepala Departemen Keuangan (Anonim, 1951: 27-29).

Struktur kepengurusan Partai Masyumi dari 1950 hingga awal 1951 mencakup tiga bidang. *Pertama*, Fraksi Masyumi di parlemen yang jumlahnya mencapai 48 orang. *Kedua*, anggota Masyumi yang menjabat sebagai menteri dalam Pemerintahan RI (4 orang, yakni: Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri, Mr. Mohammad Roem sebagai Menteri Luar Negeri, Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama). *Ketiga*, anggota Masyumi yang diutus ke luar negeri sebagai duta besar, yakni Hadji Rasjidi sebagai duta besar RI di Mesir. Disebutkan nama-nama anggota Masyumi yang terkemuka sebanyak 7 orang, yakni: Dr. Helmi, Mr. Soebardjo, Ir. Pangeran Noor, Dr. Djamaludin, Kahar Mudzakir, Gaffar Ismail, dan Mr. Kasmat) (Anonim, 1951: 30-

⁸ Gerakan Islam dimasukkan dalam kategori aliran pembaru (pembaruan) karena berusaha melakukan *Tajdid* (pemurnian sekaligus pembaruan) dalam pengamalan keberagamaan yang didasarkan pada Al Quran dan As-Sunnah, menjauhkan diri dari tradisi yang dianggap mengandung unsur takhayul, bid'ah dan khurafat (TBKh), menganjurkan *ijtihad* (penalaran untuk memecahkan persoalan), dan berupaya mewujudkan keselarasan dengan kehidupan modern (peradaban Barat). Biasanya aliran pembaru (pembaruan) dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dari para tokoh pembaru Mesir seperti Al-Afghani, Abduh dan Rasyid Ridha. Sementara aliran tradisional menolak semua yang ditawarkan oleh aliran pembaru (pembaruan) karena berusaha kukuh mempertahankan tradisi Islam yang sudah ada. Lihat dalam Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3-7.

⁹ Deliar Noer sama sekali tidak menyebut PSII sebagai anggota istimewa Masyumi. Namun, Syaifullah menyebutnya.

¹⁰ Asal muasal PSII adalah dari Sarekat Islam (SI) yang berdiri pada 1912 sebagai transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada 1911. SI sebagai gerakan massa, setelah mencapai masa kejayaannya pada 1915 dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 3 juta orang, SI harus mengalami persaingan internal dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada 1920 dan awalnya berkembang dari SI Cabang Semarang. Pada 1923, SI melakukan usaha konsolidasi partai yang berakibat merosotnya pamor SI, dan selanjutnya pada 1927 SI berubah menjadi PSII. Dalam tahun 1932, PSII mengalami perpecahan dengan lahirnya Partai Islam Indonesia (PARII) yang dipimpin oleh Dr. Soekiman. Berikutnya, dalam tahun 1936, setelah HOS Tjokroaminoto wafat pada 1934, PSII pecah lagi menjadi dua PSII lama yang tetap bergerak secara non-kooperatif, dengan PENYEDAR yang bersifat kooperatif dan dipimpin oleh Agoes Salim. Lihat dalam Anonim, *Kepartaian ..., op. cit.*, hlm. 32-34.

31). Dari 7 orang anggota Masyumi yang terkemuka itu, ada dua orang yang berasal dari Yogyakarta dan keduanya merupakan tokoh Muhammadiyah, yakni Kahar Mudzakir dan Mr. Kasmat.

Pola relasi Muhammadiyah dan Masyumi yang berlaku baik secara nasional maupun lokal, mengutip Syaifullah (1997: 190-221), mengikuti tiga tahap. *Pertama*, relasi yang akrab dan mesra (1945-1955). Pola yang pertama ini dibagi lagi dalam dua tahap: 1. lima tahun awal [1945-1950], relasi Muhammadiyah dan Masyumi sudah mesra namun energi keduanya sebagian besar dihabiskan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI dari tangan Belanda; 2. lima tahun yang kedua [1950-1955], relasi Muhammadiyah dan Masyumi bertambah mesra. Terdapat tiga tanda mengenai hal ini, yakni: (1) jumlah orang Muhammadiyah dalam kepengurusan Masyumi di atas 50 %, dan sumbangan Muhammadiyah dalam jabatan Kabinet yang dipimpin oleh atau koalisi dengan Masyumi cukup berarti;¹¹ (2) sumbangan Muhammadiyah dalam merumuskan konsep ikatan Masyumi dengan anggota istimewa sebagaimana diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1951 dan (3) keterkaitan yang sangat erat dalam pemikiran Muhammadiyah dan Masyumi, terutama dalam aspek politik dan masyarakat. Jika Muhammadiyah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam, maka Masyumi bertujuan untuk mewujudkan tegaknya Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. Bedanya, Masyumi berkiprah dalam lapangan politik, sementara Muhammadiyah bekerja dalam lapangan masyarakat (Syaifullah, 1997: 191-193).¹²

Terkait dengan tujuan Masyumi tersebut, maka Masyumi dapat dikategorikan sebagai gerakan Islamis yang berpegang pada Islamisme,¹³ sekalipun Masyumi bukan gerakan yang pertama. Agus Salim dapat dianggap sebagai tokoh Islamis pertama yang berusaha secara sistematis dan tersurat menghubungkan Islam dengan masalah politik yang dihadapi bangsa dan negaranya. Agus Salim-lah yang memberikan warna Islam pada gerakan Sarekat Islam (SI) (Elson, 2007: 231).

Dominasi politik Muhammadiyah dalam kepengurusan Masyumi, mulai tampak sejak tahap pertama (1945-1955), relasi keduanya yang akrab dan mesra. Tepatnya dalam masa lima tahun yang kedua (1950-1955), khususnya setelah NU keluar dari keanggotaan istimewa Masyumi. Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan utama dan bahkan menjadi tulang punggung Masyumi, baik dalam lingkup nasional maupun lokal seperti halnya di Yogyakarta.

Kedua, pola relasi renggang sebagai hasil dari Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1956. Pada sidang tanwir Muhammadiyah di Kaliurang itu, muncul empat corak pemikiran: (1) menginginkan agar Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik, yang disuarakan oleh aktivis politik Muhammadiyah yang tidak puas dengan Masyumi; (2) menghendaki Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi namun tetap

¹¹ Contoh, dalam Kabinet Mohammad Natsir (1950-1951), Muhammadiyah hanya mendapatkan jatah 1 menteri. Selanjutnya dalam Kabinet Sukiman (1951-1952), Muhammadiyah memperoleh jatah 3 menteri, dan puncaknya masa Kabinet Wilopo, Muhammadiyah mendapatkan 4 jabatan menteri. Syaifullah tidak menyebut nama menteri yang berasal dari Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah yang menjadi menteri pada Kabinet Mohammad Natsir adalah Mr. Mohammad Roem yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam Kabinet Sukiman, tiga menteri berasal dari Muhammadiyah, yaitu: Dr. Sukiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Subardjo, dan Menteri Sosial Mr. Samsuddin. Berikutnya, dalam Kabinet Wilopo, empat menteri dari Muhammadiyah, yakni: Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem, Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, dan Menteri Agama K.H. Fakhri Usman. Lihat dalam Susan Finch and Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinets, 1945-1965*, (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University, 1965), p. 24-28.

¹² Muhammadiyah bekerja dalam lapangan masyarakat lantaran kedudukannya sebagai organisasi atau gerakan Islam, *Tajdid* (pemurnian dan pembaruan), serta *Dakwah Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* (ajakan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan).

¹³ Islamisme, mengutip RE Elson, dipahami sebagai penggunaan atau penghikmatan politik yang didasarkan pada Islam di atas semua yang lain. RE Elson menyebut SI di bawah HOS Tjokroaminoto belum dapat disebut sebagai gerakan Islamis meskipun sudah meupakan kekuatan politik yang berpengaruh. Alasannya, SI masih menghadapi masalah meningkatnya oposisi pemerintah kolonial, soal kepercayaan Muslim, dan soal mempertahankan Islam dalam masyarakat multibudaya dan multiagama. Lihat RE Elson, "Islam, Islamism, The Nation and The Early Indonesian Nationalist Movement," in *Journal of Indonesian Islam*, Volume 01, Number 02, December 2007, pp. 231, and 250-251.

sesuai dengan *khittah*-nya sebagai gerakan Islam, *tajdid* dan dakwah *amar ma'ruf wanahi munkar*, sementara untuk urusan politik diserahkan secara personal; (3) menginginkan Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang ikatannya dengan Masyumi dalam bentuk federasi; dan (4) menginginkan agar hubungan Muhammadiyah dan Masyumi tetap berlangsung seperti biasa karena tujuan Muhammadiyah dan Masyumi sejalan (Syaifullah, 1997: 194-198).

Ketiga, pola akhir relasi karena pembubaran Masyumi tahun 1960 dan Muhammadiyah berusaha menyelamatkan diri dari stigma yang melekat pada Masyumi sebagai partai terlarang karena dianggap terlibat dalam peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).¹⁴ Bahkan, Muhammadiyah diketahui telah menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. Hc.) kepada Bung Karno dalam ilmu filsafat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.¹⁵

Pola relasi yang dikemukakan oleh Syaifullah tidak sepenuhnya benar. Pola kedua yang menyatakan bahwa relasi Muhammadiyah dan Masyumi renggang itu lebih bersifat teoritis ketimbang praktis. Dalam kenyataannya, relasi antara Muhammadiyah dan Masyumi di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta, sejak partai ini berdiri (1945) dan Muhammadiyah menjadi salah satu anggota istimewa, tetap akrab dan mesra hingga bubar (1960). Pola relasi yang akrab dan mesra antara Muhammadiyah dengan Masyumi tidak berakhir pasca Pemilu 1955 sebagaimana sinyalemen Syaifullah.

Adanya saling ketergantungan dan identifikasi diri antar-orang atau aktivis Muhammadiyah dan Masyumi tetap berlangsung hingga Masyumi bubar tahun 1960. Bahkan, menurut pendapat Mutiah Amini (2011), dalam studi kasusnya di Kotagede, pembubaran Masyumi telah membuat para aktivis politik Masyumi kembali lagi ke Muhammadiyah sebagai basis awalnya. Baik anggota Masyumi maupun Muhammadiyah sama-sama berprinsip "Muhammadiyah tempat beramal, dan Masyumi tempat berjuang". Dapat dikatakan amat jarang anggota dan simpatisan Masyumi yang pindah ke partai lain atau keluar dari Muhammadiyah, kecuali karena takut kehilangan jabatan sehingga ada beberapa kepala desa Masyumi yang pindah ke NU,¹⁶ sebagaimana juga pernah disinggung oleh Nakamura (1983: 129).

III. KIPRAH POLITIK TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH AKTIVIS MASYUMI DALAM PEMERINTAHAN DAN PARLEMEN

Dominasi politik Muhammadiyah dalam Masyumi juga dapat dianalisis dengan mencermati peran politik Masyumi dalam pemerintahan, terutama melalui kiprah para

¹⁴ Pemberontakan PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein pecah pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumater Barat. Kehadiran beberapa tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir dan Syafrudin Prawiranegara dalam proklamasi PRRI telah menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno, dan arena pengaruh kuat PKI, akhirnya Presiden mengeluarkan Keppres No. 200/1960 tanggal 17 Agustus 1960 yang memberikan waktu satu bulan kepada pimpinan Masyumi untuk membubarkan Masyumi sebelum ditetapkan sebagai partai terlarang. Sebenarnya pimpinan Masyumi seperti Prawoto Mangkusasmito telah memberikan pembelaan bahwa pembentukan PRRI inkonstitusional dan kehadiran beberapa tokoh Masyumi di Padang bukan atas nama Masyumi. Namun penjelasan Prawoto diabaikan oleh PKI dan tidak didengar oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya baca dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Jilid 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 377-379.

¹⁵ Gelar Dr. Hc. yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada Bung Karno dalam bidang filsafat, yakni ilmu kalam atau ilmu tauhid merupakan gelar ilmiah. Pemberian gelar itu didasari oleh pertimbangan dan penghargaan kepada beliau atas karya-karyanya baik pidato atau karangan, misalnya tentang penggalan api Islam, seruan ijtihad dan anti-taqlid, pentingnya rasio untuk mempertebal iman, kesempurnaan sifat Tuhan yang tidak terbatas dua puluh, dan penggalan Pancasila yang menyertakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Baca selengkapnya dalam Muhammad Djaldan Badawi (penyalin), *Buku Putih Muhammadiyah Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1962-1965 dan 1965-1968*, (Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001), hlm. 26-27.

¹⁶ Fenomena semacam itu dapat dikatakan merupakan anomali atau penyimpangan. Lihat Mutiah Amini, "Komunis di Kota Santri: Politik Lokal Kotagede pada 1950-1960-an," dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (penyunting), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV, 2011), hlm. 283.

tokohnya. Mengutip Insan Fahmi Siregar (2008:20), peran politik Masyumi dalam pemerintahan sepanjang 1945-1960 dapat dibagi dalam tiga pola. *Pertama*, pola Masyumi sebagai partai yang bersikap kritis kepada pemerintah yang berlangsung selama masa Revolusi Fisik (1945-1949). Dalam beberapa kabinet yang terbentuk, sebenarnya terdapat kader partai yang dilibatkan untuk duduk sebagai menteri, namun secara kepartaian, Masyumi tidak dilibatkan. Mereka tidak mewakili partai, dan hanya atas nama pribadi.¹⁷

Mengutip Deliar Noer (1983:14), M. Rasyidi berjasa besar dalam pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Uniknya, usulan pembentukan Kementerian Agama datang dari tokoh-tokoh Masyumi yang duduk dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) Banyumas, seperti K.H. Abu Dardiri, S. K.H. Soleh Su'ady dan Sukosos Wirjosaputro. Khusus mengenai K.H. Abu Dardiri, beliau adalah Konsul Muhammadiyah Wilayah Banyumas.¹⁸ Usulan tersebut kemudian disetujui oleh para anggota KNI Pusat, dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah dan berhasil dikabulkan oleh Menteri Agama.

Kedua, pola Masyumi sebagai partai pemerintah pada masa Demokrasi Liberal. Pola ini berlangsung sejak 1950 sampai 1956, mulai dari Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Burhanuddin Harahap, dan Ali II, minus Kabinet Ali I. Dalam pola ini, kader-kader partai Masyumi yang sebagian besar merupakan kader Muhammadiyah duduk dalam pemerintahan, baik pada pos perdana menteri, wakil perdana menteri maupun pos kementerian. Pada masa Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi, Pemilu untuk DPR dan konstituante dapat berjalan dengan baik (Siregar, 2008: 22-25).

Ketiga, pola ketika Masyumi menjadi partai oposisi pada masa transisi menuju masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1959. Jatuhnya Kabinet Ali II dan disusul terbentuknya Kabinet Karya di bawah Perdana Menteri Juanda menandai masa transisi menuju Demokrasi Terpimpin. Hal ini karena Kabinet Juanda menunjukkan pola *Zaken Kabinet* yang lebih menitikberatkan pada kecakapan dan keahlian para menteri. Sementara pembentukan Kabinet dalam zaman Demokrasi Liberal lebih mengedepankan pada perimbangan kekuatan partai politik di dalam parlemen. Sementara sikap oposisi Masyumi tampak pada penolakannya terhadap konsep *Zaken Kabinet* dan selanjutnya konsep Demokrasi terpimpin yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno (Siregar, 2008: 25-28).¹⁹ Kesan Masyumi sebagai partai oposisi berimbas pada Muhammadiyah yang dianggap sebagai bagian dari Masyumi, termasuk dalam gerbong partai oposisi.

Tampaknya, tiga pola peran politik partai Masyumi tersebut lebih berlaku di tingkat pusat, dan kurang relevan untuk skala lokal seperti di Yogyakarta. Hal itu karena, di Yogyakarta sejak 1945-1960, partai Masyumi selalu dilibatkan di dalam parlemen daerah ataupun di pemerintahan. Sebagai contoh, Ketua DPR DIY yang pertama dipegang oleh kader Masyumi sekaligus anggota Muhammadiyah, Wiwoho Purbohadijoyo, dan kemudian menjadi Sekretaris Pemerintah Daerah DIY (Suwarno, P. J., 1994: 450). Demikian pula,

¹⁷ Analisis tersebut ditujukan pada Masyumi secara nasional dalam perspektif kekuasaan politik. Lihat Insan Fahmi Siregar, "Pasang Surut peran Politik Masyumi Dalam Pemerintahan (1945-1960)", dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35, No. 1, Juni 2008, hlm. 20-21. Contoh, dalam Kabinet Syahrir sebagai kabinet pertama, kader Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah, M. Rasyidi, duduk sebagai Menteri Agama. Tokoh intelektual Muhammadiyah ini lahir di Kotagede, Yogyakarta, 20 Mei 1915. Pendidikan dasarnya ditempuh di Sekolah Muhammadiyah Kotagede dan Kweekschool Muhammadiyah Ngabean. Rasyidi kemudian melanjutkan belajar di Sekolah Al-Irsyad di Lawang, Malang, Jawa Timur. Sementara pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beberapa karya tulisnya menunjukkan bahwa beliau tokoh intelektual Muslim dan Muhammadiyah yang mumpuni. Mengenai riwayat hidup dan karya-karya tulis Prof. Dr. M. Rasyidi, selengkapnya baca Muh. Syamsuddin, *Prof. Dr. H.M. Rasjidi Pemikiran dan Perjuangannya*, (Yogyakarta: Aziziah, 2004), terutama hlm. 28-46, dan hlm. 53-86.

¹⁸ Mengenai proses pembahasan usulan pembentukan Kementerian Agama dalam KNI Banyumas dan biografi singkat K.H. Abu Dardiri, lihat dalam Suwarno dan Asep Daud Kosasih, *Relasi Agama dan Negara Dalam Skala Lokal Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMP Press, 2014), hlm. 51-52, dan 81-85.

¹⁹ Mengutip Anhar Gonggong, ada dua partai yang paling tegas menyatakan penolakan terhadap konsepsi Presiden Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin, yakni Masyumi yang dimotori oleh Muhammad Natsir, dan Partai Katholik yang dipimpin oleh I.J. Kasimo. Keduanya adalah kawan demokratis yang sangat akrab. Demokrasi Terpimpin dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan yang bermartabat. Lihat Anhar Gonggong, "Kasimo: Politik Bermartabat", dalam *Majalah Basis*, Nomor 11 12, Tahun Ke-59, 2010, hlm. 34-35.

dalam kedudukan sebagai pimpinan DPR DIY dan DPR Kotapraja Yogyakarta, serta sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejak awal kemerdekaan hingga akhir masa Demokrasi Liberal, selalu ada kader Partai Masyumi yang notabene merupakan anggota Muhammadiyah duduk pada jabatan pimpinan ketiga lembaga tersebut.

Pada tingkat nasional, terdapat daftar nama anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi yang berasal dari dan merupakan anggota Muhammadiyah (terlampir). Dari daftar tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dicermati. *Pertama*, penggunaan istilah saudara di depan nama anggota Muhammadiyah yang duduk dalam Dewan Konstituante dari Masyumi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama Islam berupa egalitarianisme (persamaan semua orang di hadapan Allah dan hukum) telah diterapkan baik oleh Muhammadiyah maupun oleh Masyumi.

Kedua, daftar nomor 31 tidak ada karena setelah nomor 30 langsung nomor 32, berarti anggota Muhammadiyah yang duduk dalam Dewan Konstituante dari Masyumi bukan 43 orang melainkan 42 orang. Temuan penelitian ini bahwa anggota Dewan Konstituante yang berasal dari Muhammadiyah sebanyak 42 orang sebagai bagian dari Fraksi Partai Islam Masyumi dalam Dewan Konstituante sebanyak 112 orang (37,5 %) sekaligus untuk mengoreksi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syaifullah bahwa anggota Masyumi di Dewan Konstituante yang berasal dari Muhammadiyah berjumlah 21 orang (18,75 %).²⁰ Perbedaan temuan itu karena penelitian Syaifullah mengambil sumber dari buku karangan Bajasut (1972). Sementara sumber yang digunakan penulis adalah bahan dokumenter berupa arsip yang tersimpan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengenai daftar anggota Konstituante yang berasal dari Muhammadiyah.

Ketiga, beberapa anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota konstituante mewakili Masyumi dan berasal dari Yogyakarta, antara lain: Amelz, Prof. R.H. Kasmat, A.R. Baswedan, Prof. H.A. Kahar Muzakir, R.H. Hadjid, dan Muh. Hasbi Assidiqy. Amelz berasal dari Aceh yang kemudian tinggal di Yogyakarta dan menjadi anggota aktif Masyumi. Yang menarik dari tokoh ini, ia pernah menulis buku mengenai tokoh puncak Sarekat Islam (SI) dalam tahun 1952 berjudul *HOS Tjokroaminoto dan Perjuangannya* (Jakarta: Bulan Bintang).²¹ Prof. R.H. Kasmat sudah dijelaskan di atas, demikian pula dengan Prof. H.A. Kahar Muzakir. Jadi, yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah A.R. Baswedan dan R.H. Hadjid.

Pada saat terbentuknya BPUPKI, AR Baswedan termasuk salah satu anggota BPUPKI yang mewakili komunitas Arab. Setelah Indonesia merdeka, AR Baswedan pernah menjadi anggota KNIP, dan puncaknya menjadi Menteri Muda Penerangan dalam Kabinet Syahrir I. Beliau kemudian menjadi anggota Konstituante sampai Masyumi bubar. Selanjutnya, AR Baswedan menetap di Yogyakarta, tinggal di Taman Yuwono Nomor 19, dan aktif dalam aktivitas dakwah sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Yogyakarta.²²

²⁰ Menurut Syaifullah, anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi yang berjumlah 112 orang, ada sebanyak 21 orang dari Muhammadiyah, yakni: (1) Muhammad Sardjan, (2) K.H. Fakhri Usman, (3) Mr. H. Kasmat, (4) Dr. Kusnadi, (5) Dr. H. Sukiman Wirjosandjojo, (6) Kamka, (7) Prawoto Mangkusasmito, (8) Prof. A. Kahar Muzakir, (9) Mr. H. Kasman Singodimedjo, (10) K. Taufiqurrahman, (11) Ahmad Dasuki, (12) E. Sutoleksono, (13) Amelz, (14) Mr. Djamaluddin Datuk Singomangkuto, (15) K.H. Ahmad Azhari, (16) Zainal Abidin Su'aeb, (17) A.R. Sutan Mansur, (18) Abdul Malik Ahmad, (19) Oesman Ralibi, (20) K.R.H. Hadjid, dan (21) K.H. Asnawi Hadisiwojo. Periksa Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 174.

²¹ Periksa Daftar Pustaka dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api ...*, *op. cit.*, hlm. 558. Penulis tidak berhasil melacak keberadaan buku jilid I larya Amelz tersebut, namun bisa mendapatkan buku jilid II dengan judul sedikit berbeda, *H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1952), .

²² AR Baswedan juga pernah menjadi wartawan, penyair, dan penulis yang cukup produktif. Beberapa karya AR Baswedan yang telah dibukukan, antara lain: (1) *Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab*, dicetak tahun 1934; (2) *Debat Sekeliling PAI*, dicetak tahun 1939; (3) *Rumah Tangga Rasulullah*, diterbitkan tahun 1940 oleh Bulan Bintang; (4) *Buah Pikiran dan Cita-cita AR Baswedan*, diterbitkan oleh Sekjen PAI, Salim Maskati; dan (5) *Menuju Masyarakat Baru (Cerita Toneel dalam 5 Bahagian)*. Baca Suratmin, *Abdul Rahman Baswedan Karya dan Pengabdianya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989), hlm. 103-109, 123, dan 170.

Sebagai salah seorang tokoh Masyumi yang menonjol, AR Baswedan dikenal sangat dekat, akrab dan bersahabat baik dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Hamka, Buya AR Sutan Mansur, AR Fachruddin, Daris Tamim, dan A. Mukti Ali. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah anggota Muhammadiyah. Pengakuan AR Baswedan sendiri dalam sebuah tulisan di *Suara Muhammadiyah* (SM) tahun 1971 menunjukkan bahwa pada masa mudanya dia pernah aktif di Muhammadiyah dan sampai tulisannya dimuat di SM itu masih tetap sebagai warga Muhammadiyah. Lebih jauh, AR Baswedan menuturkan pengalamannya aktif di Muhammadiyah sebagai berikut:

“Sedjak berusia lk. 16 tahun, penulis sudah tertarik kepada Muhammadiyah dan tumbuh dalam Muhammadiyah dengan pertama kali ikut dalam Madjlis Tabligh Muhammadiyah di Surabaya yang ketika itu dipimpin oleh alm. KH Mas Mansur yang selanjutnya menjadi sahabat akrab dari penulis” (SM, 1971:12).²³

Kahar Mudzakir memang lebih dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Namun, beliau pernah menjadi Ketua Partai Masyumi Cabang Yogyakarta (Tashadi, 1986: 27). Tampaknya, jabatan tersebut disandang oleh Abdul Kahar Mudzakir sejak awal keberadaan Masyumi hingga tahun 1950-an. Pengganti selanjutnya sebagai Ketua Masyumi Cabang Yogyakarta adalah Mr. R.H. Kasmat (Anonim, 1953: 45).²⁴

Nama lengkap Kahar Mudzakir adalah Abdul Kahar Mudzakir. Tokoh ini dilahirkan pada 16 Nopember 1907 di Kotagede. Aktivitas politiknya mulai dikenal sejak dia menjadi anggota Pengurus Besar Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938-1942, dan anggota Majelis Rakyat Indonesia (MRI), 1941-1942. Pada masa pendudukan Jepang, antara tahun 1942-1943, Abdul Kahar Mudzakir adalah Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai pegawai pegawai militer pemerintah Jepang di Yogyakarta. Pada 1943-1945, dia diangkat sebagai pegawai markas besar militer Jepang di Jakarta, dan pada 1944 diangkat sebagai akting Direktur Departemen Agama Pemerintah Militer Jepang (*Gun Seikambu Syumubu Zicho*) mewakili K. H. Hasyim Asy'ari (Tashadi, 1986: 23-25, dan 63).

Perjuangan politik Abdul Kahar Mudzakir mencapai puncaknya dalam tahun 1945. Pada waktu itu, dia telah tampil menjadi anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan yang kemudian berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.²⁵ Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*), oleh Mr. Moh. Yamin disebutnya sebagai “*Gentlement Agreement*” karena merupakan bentuk kompromi dan jalan keluar dari munculnya dua kubu (Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) dalam BPUPKI ketika membahas persoalan mengenai dasar negara (Tashadi, 1986: 25-26).²⁶

R.H. Hadjid dikenal sebagai salah seorang pemimpin Muhammadiyah yang pernah menjadi murid langsung K.H. Ahmad Dahlan dan anggota Konstituante hasil Pemilu 1955 dari Fraksi Masyumi dan mewakili basis konstituen Yogyakarta. Tokoh ini dikenal sebagai

²³ A.R. Baswedan, “Kepada Buja A.R. St. Mansur Kepada Bapak A.R. Fachruddin,” dalam *Suara Muhammadiyah* (SM), Nomor 16-17, Tahun Ke-51, 1971, hlm. 12. Suratmin sebagai penulis biografi AR Baswedan juga tidak mengetahui bahwa AR Baswedan adalah anggota Muhammadiyah.

²⁴ Dalam sumber yang lain, Ketua Masyumi Cabang Yogyakarta disebut sebagai Ketua Masyumi Daerah Yogyakarta. Partai Islam Masyumi Yogyakarta beralamat di Jalan Ngadiwinatan No. 40 Yogyakarta, Ketua Daerah dijabat oleh Mr. R.H. Kasmat, dan Ketua Cabang dijabat oleh Muridan Noto. Periksa Anonim, *Mana Tempatnya?*, (Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kotapradja, 1953), hlm. 45.

²⁵ Anggota Panitia Sembilan terdiri atas: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Moh. Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Mudzakir, Mr. Achmad Subardjo, dan K.H. Wachid Hasjim. Piagam Jakarta menjadi embrio Pembukaan UUD 1945 karena di dalamnya terdapat Pancasila yang berisi lima sila seperti Pancasila sekarang. Perbedaannya terletak pada sila pertama, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi terdapat tujuh kata setelah kata Ketuhanan.” Lihat naskah Piagam Djakarta itu dalam Anonim, *Lahirnja Pantja-Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut Piagam Djakarta*, (Djakarta: Tridjaja, 1947), hlm. 47-48.

²⁶ Perimbangan kekuatan politik nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler, menurut Ahmad Syafii Maarif, yang mengutip hasil pengamatan Prawoto Mangkusamito, dalam BPUPKI hanya sekitar 20 % (15 dari 62 anggota) yang benar-benar mewakili aspirasi umat Islam. Baca Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 88. Sementara dalam Panitia Sembilan, perimbangan itu menjadi 4 : 5 (44 %).

seorang alim yang mumpuni, dan seorang guru di *Kweekschool* Muhammadiyah Yogyakarta yang mampu memberikan tuntunan dan keteladanan bagi para guru Muhammadiyah. R. H. Hadjid telah menulis buku yang dimaksudkannya sebagai semacam pedoman mengajar bagi para guru sekolah Muhammadiyah baik laki-laki maupun perempuan,²⁷ buku kumpulan surat dan ayat yang diajarkan oleh K. H. Ahmad Dahlan berjudul *Pelajaran KHA Dahlan 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran* (2005). Perjuangannya pada masa Revolusi Fisik atau Perang Kemerdekaan RI (1945-1949), menunjukkan kecintaannya kepada tanah air Indonesia, dengan cara ikut berjuang mengangkat senjata dan menjadi Ketua Angkatan Perang Sabil (APS).²⁸

Selanjutnya, anggota Konstituante dari Masyumi dan berasal dari Yogyakarta adalah Muh. Hasbi Assidiqy, yang lebih dikenal sebagai penulis buku-buku, khususnya mengenai fiqh dan tafsir.²⁹ Muh. Hasbi Assidiqy lahir di Lhokseumawe Aceh pada 10 Maret 1904. Tokoh ini lebih dikenal sebagai tokoh otodidak karena pendidikannya lebih banyak dihabiskan dari satu *dayah* (semacam pesantren) ke *dayah* yang lain. Mulai aktif di Muhammadiyah sejak pindah ke Kutaraja, Banda Aceh, pada 1933. Lima tahun kemudian (1938), Muh. Hasbi Assidiqy terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Kutaraja. Selanjutnya ia menjadi Konsul Muhammadiyah Aceh dari 1943 sampai 1946. Dalam tahun 1951, tokoh ini pindah dan menetap di Yogyakarta. Sejak pindah ke Yogyakarta, bakat menulis Muh. Hasbi Assidiqy meningkat pesat. Beberapa karya monumentalnya ialah *Tafsir An-Nur* (30 jilid) yang selesai dituliskannya tahun 1961, kemudian *Mutiara Hadits* (8 jilid) selesai tahun 1968, dan Koleksi *Hadits Hukum* (11 jilid) yang selesai naskahnya tahun 1971. Beliau juga aktif menulis artikel di beberapa majalah dan surat kabar seperti *Suara Muhammadiyah*, *Panji Masyarakat*, *Hikmah*, *Al-Djami'ah*, dan *Sinar Darussalam*. Muh. Hasbi Assidiqy dapat dianggap sebagai tokoh penggagas Fiqh Indonesia.³⁰

Beberapa kader Masyumi yang pernah duduk dalam keanggotaan DPRD dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) DIY serta Kotapraja Yogyakarta diketahui merupakan anggota Muhammadiyah. Mereka antara lain: Wiwoho Purbohadijoyo yang pernah menjadi Ketua DPRD DIY pertama dan dikenal sebagai pendiri Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938. Beberapa kader yang lain adalah Wazir Nurie, Mr. Kasmat, Moh. Mawardi, Dalhar Maksoem, dan Hammam Hasjim. Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari lima kader Masyumi sekaligus anggota Muhammadiyah selain Wiwoho Purbohadijoyo.

Wazir Nurie merupakan tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Jalan Mawar Nomor 55 Yogyakarta. Tokoh ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1903. Pendidikan yang ditempuhnya di Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Juru Rawat dan *Hollands Inlandsche School* (HIS). Pada saat riwayat hidupnya ditulis, 23 September 1953, MH. Wazir Nurie menjabat sebagai wakil Ketua DPD Kotapraja Yogyakarta dan anggota DPR DIY. Antara tahun 1951-1953, MH. Wazir Nurie terpilih sebagai Ketua Majelis Perwakilan Daerah (MPD)

²⁷ Beruntung penulis bisa mendapatkan buku karangan R.H. Hadjid, *Guru Tabligh*, (Poerbolingo, Boekhandel Persatuan, Jilid II, Cetakan II, 1934). Sayangnya buku jilid I tidak penulis dapatkan. Ada hal yang sangat menarik dari buku tersebut bahwa menurut R.H. Hadjid, sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru tabligh, yakni guru yang sekaligus dapat mendakwahkan Islam, meliputi 4 sifat: (1) tetap dalam menjalankan sesuatu atau istiqamah, (2) mempunyai hati sayang dan belas kasihan, (3) lemah lembut, dan (4) cerdik serta pandai. Baca *ibid.*, hlm. 5.

²⁸ Perjuangan R.H. Hadjid pada Perang kemerdekaan dapat dibaca dalam Tim Penulis, *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), terutama Bab IV, hlm. 43-76.

²⁹ Hasbi Assidiqy adalah guru besar Islam yang sangat produktif menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku. Namun, penulis hanya dapat menemukan dua buku yang dituliskannya dalam tahun 1950-an. Pertama, *Sedjarah Kehakiman dalam Pemerintahan Islam*, (Medan: Toko Buku Islamijah, 1950); dan kedua, *Beberapa Rangkaian Ajat (Untuk Peladjaran Tafsir bagi Sekolah Permulaan)*, (Bandung: Alma'arif, 1952). Tampaknya karya Mohd. Hasbi Assidiqy sebagian besar dituliskannya dalam tahun 1970-an.

³⁰ Baca dalam Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3, 13-15, 36-38, dan 55. Buku tersebut diolah dari karya disertasi penulisnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang Universitas Islam Negeri [UIN]) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal yang unik dan menarik adalah penulisnya merupakan anak kandung dari Muh. Hasbi Assidiqy. A. Mukti Ali menyebut karya Nourouzzaman Shiddiqi itu sebagai "bakti kepada ilmu" sekaligus "bakti kepada ayah". Lihat A. Mukti Ali, "Sambutan", dalam *ibid.*, hlm. vii-viii.

Muhammadiyah Yogyakarta, setingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) priprinsi. Sampai tahun 1950, MH. Wazir Nurie adalah sekretaris Masyumi wilayah Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 1951, beliau diangkat sebagai Wakil Ketua Masyumi wilayah Yogyakarta. Dalam tahun 1952-1953, MH. Wazir Nurie menjabat sebagai pimpinan Masyumi Cabang Yogyakarta. Sejak 1950, beliau juga anggota DPR DIY dari Fraksi Masyumi yang kemudian terpilih sebagai anggota DPD Propinsi DIY Seksi II. Ada hal yang menarik mengenai beliau soal pengalaman dalam masyarakat dan keterangan keluarga. Pada soal pengalaman dalam masyarakat disebutkan beberapa pekerjaan beliau, antara lain: berdagang, mengajar, mubaligh, sopir, dan karyawan percetakan. Sementara pada soal keterangan keluarga disebutkan istri beliau Hj. Siti Dachirah, anak 5 orang, serta yang menjadi tanggungan beliau lainnya adalah ibu sendiri, ibu mertua dan 2 orang *chadam* (pembantu).³¹

Perihal Mr. Kasmat dapat dikemukakan bahwa beliau dilahirkan pada 5 Mei 1908 di Kotagede Yogyakarta. Alamat tempat tinggal di Kotabaru Yogyakarta. Ketika riwayat hidup singkat beliau dituliskan sendiri pada 1 Agustus 1951 untuk keperluan dokumentasi dari Pengurus Besar (P.B.) Muhammadiyah, beliau bekerja sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kota Yogyakarta sekaligus sebagai anggota DPRD DIY. Pekerjaan sambilan lainnya adalah sebagai pengacara (advocat) dan dosen Universitas Islam Indonesia (UII). Saat itu beliau termasuk dalam anggota PB Muhammadiyah. Dalam Partai Masyumi, Mr. Kasmat yang merupakan seorang ahli hukum lulusan Universitas Leiden Belanda, posisinya sebagai Wakil Ketua Masyumi wilayah Yogyakarta.³²

Ada sebuah catatan menarik dari kiprah Mr. Kasmat dalam kedudukan beliau sebagai Wakil Ketua KPPP (Kantor Pemilihan Pusat Provinsi) DIY pada Pemilu 1951. Beliau memberikan penjelasan mengenai kejahatan Pemilu. Dalam penjelasan itu, salah satunya beliau mengutip pasal 151 UU No. 7 Tahun 1950 yang berisi larangan untuk mengaku dirinya sebagai orang lain karena dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan. Untuk mengatasi hal itu, beliau membolehkan orang menggunakan “nama paraban” bagi orang yang memiliki nama sama atau mirip. “Nama paraban” itu terkadang sangat lucu kedengarannya. Misalnya, Dibjo-Djangkrik, Sudibjo-Gareng, Kromo-Dangkluk, Sastro-Leong, Sastro-Pringis, dan lain sebagainya.³³

Moh. Mawardi adalah anggota DPR DIY dari Fraksi Masyumi sejak 1950. Tokoh Muhammadiyah ini terpilih sebagai anggota DPD Seksi I bersama dengan Sugijopranto (Seksi I, Fraksi PPDI), Susanto (Seksi III, Fraksi Buruh/Tani), Mr. Kasmat (Seksi IV, Masyumi), dan dr. Sahir (PNI, Seksi V).³⁴

Dalhar Maksoem merupakan anggota DPR Kotapraja Yogyakarta yang berasal dari Fraksi Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Pada 1953, anggota DPR Kotapraja Yogyakarta berjumlah 50 orang berasal dari 12 fraksi, meliputi: Masyumi (11 orang), PNI (11 orang), Katholiek (7 orang), Parkindo (4 orang), GPII (4 orang), Murba (5 orang), PSII (1 orang), Gabungan Rukun Kampung (2 orang), Perwari (2 orang), Partai Wanita Rakyat (1 orang), PGRI (1 orang), dan CHTH (1 orang). Dalhar Maksoem kemudian terpilih sebagai anggota DPD Kotapraja Yogyakarta bersama dengan Wazir Nurie (Masyumi), Mohammad Djumali (PNI), Prodjohandoko (PNI), dan R.C. Tjiptosumarto (Katholiek) (Anonim, 1953:

³¹ Riwayat hidup Wazir Nurie yang warna-warni itu dapat dibaca dalam *Arsip Tjatan Pokok untuk dokumentasi Pengurus Besar Muhammadiyah* atas nama H. MH. Wazir Nurie.

³² *Arsip Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah berupa Tjatan Pokok Ketua/Anggauta PB Muhammadiyah tahun 1951*. Tidak perlu dibuat heran jika penggunaan istilah wilayah, daerah dan bahkan cabang digunakan untuk posisi yang sama dalam kepengurusan partai politik.

³³ Penjelasan Mr. R.H. Kasmat itu dapat dilihat pada Anonim, *Mimbar Pemilihan Umum Sekitar Pemilihan Umum di Djokjakarta*, (Djakarta: Kementerian Penerangan RI, 1951b), hlm. 46-47.

³⁴ Panitia Redaksi, *Ulang Tahun Ke-1 D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta*, (Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, 1952), hlm. 18 dan 56. Penulis tidak berhasil mendapatkan riwayat hidup Moh. Mawardi.

20-22).³⁵

Sementara Hammam Hasjim juga dikenal sebagai anggota DPR DIY dari Fraksi Masyumi sejak 1950. Beliau dikenal sebagai anggota DPD DIY yang dalam tahun 1958 ikut menjadi anggota delegasi pemerintah DIY pada acara Konferensi Pendahuluan Antar Daerah Swatantra I se-Indonesia di Jakarta tanggal 24-27 Juni 1958.

IV. KETERLIBATAN MUHAMMADIYAH DALAM PERJUANGAN MASYUMI MEMENANGKAN PEMILU

Sebagai anggota istimewa Masyumi, tentu saja hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi sangat dekat. Kedekatan hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi di Yogyakarta, antara lain dapat ditengok dari keadaan tahun 1954, di mana Kantor Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) DIY yang dipimpin oleh H. Wazir Nurie bersebelahan dengan Kantor Pimpinan Daerah Masyumi DIY yang dipimpin oleh Sunarjo Mangunpuspito, yakni Ngadiwinatan 39 dan Ngadiwinatan 40.³⁶ Beberapa lembaga dakwah yang berada di bawah naungan (*underbouw*) Masyumi dan berkantor yang sama dengan Masyumi antara lain: Front Pemuda Islam Indonesia (FPII) pimpinan Djazim Hamidi, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pimpinan AR Fachruddin, Sekolah Tinggi Islam Indonesia (STII) pimpinan Nur Ali Tjahjopuspito, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) pimpinan Achid Masduki (Mulkhan, 1992: 14). Penulis meyakini bahwa baik pimpinan Masyumi maupun beberapa lembaga dakwah yang menjadi *onderbouw*-nya Masyumi di atas seluruhnya merupakan aktivis organisasi Muhammadiyah. Sementara itu, organisasi otonom (*ortom*) Muhammadiyah yang berkantor sama dengan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) DIY adalah Pemuda Muhammadiyah. Organisasi otonomi lain seperti Aisyiyah yang dipimpin oleh Ibanah Mochtar dan Nasyyiatul Aisyiyah (NA) pimpinan Siti War'ijah berkantor di Kauman Yogyakarta (Mulkhan, 1992: 14).

Abdul Munir Mulkhan juga mencatat ada delapan penerbitan berupa surat kabar dan majalah yang dikelola oleh ummat Islam di Yogyakarta dalam tahun 1950-an dari 39 penerbitan yang ada di wilayah DIY. Dari delapan penerbitan Islam itu seluruhnya dicetak oleh Penerbit Persatuan dan Universitas Islam Indonesia (UII). Untuk Penerbit Persatuan diketahui merupakan amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, sedangkan UII dapat diketahui bahwa sebagian besar pendirinya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Berikut daftar surat kabar dan majalah Islam dalam tahun 1950-an.

³⁵ Yang menarik, GPII meskipun bukan partai politik karena ia merupakan organisasi masyarakat yang dikenal sebagai *underbouw* Masyumi, ikut menempatkan wakilnya di parlemen kota Yogyakarta. Baik Masyumi maupun GPII, anggotanya sebagian besar berasal dari anggota atau warga Muhammadiyah.

³⁶ Dalam perkembangan kemudian, jalan Ngadiwinatan berganti nama menjadi Jalan K.H. Ahmad Dahlan. Lihat Lampiran nama-nama jalan di Yogyakarta pada masa Hindia Belanda dan masa Kemerdekaan, dalam Nurhajarini, dkk., *Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*, (Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), hlm. 166.

Tabel 1. Surat Kabar dan Majalah Islam di Wilayah DIY Tahun 1950-an

No	Nama Surat Kabar/ Majalah	Penerbit	Pemimpin Redaksi	Keterangan Terbit
1.	Suara Muhammadiyah	PP Muhammadiyah	M.J. Anies	Mingguan
2.	Nusa Putera	Badan Penerbitan Nusa Putera	A.R. Baswedan	Dwi mingguan
3.	Suara 'Aisyiyah	PP 'Aisyiyah	St. A. Dahlan	Bulanan
4.	Sinar	Sinar Kaum Muda Muhammadiyah	Dja'far S.	Bulanan
5.	Pantjaran	Majelis Tabligh PP Muhammadiyah	Djarnawi HK	Bulanan
6.	Tunas	Pelajar Islam Indonesia (PII)	H.A. Halim	Bulanan
7.	Melati	Hizbul Wathan (HW) Cabang Yogyakarta	Bisron	Bulanan
8.	Bahtera	Sarikat Siswa SGHA	Moh. Thahir Harun	Bulanan

Sumber: Mulkhan (1992:14)

Dalam tiga kali pemilihan umum (pemilu) di Yogyakarta pada masa Demokrasi Liberal, yakni Pemilu 1951, 1955 dan 1957, Muhammadiyah baik secara organisatoris ataupun secara perorangan melalui para tokohnya ikut terlibat dalam perjuangan untuk memenangkan Masyumi.

1. Pemilu 1951

Salah satu bukti dukungan kuat Muhammadiyah terhadap perjuangan Partai Islam Masyumi, terutama menjelang Pemilu 1951, adalah keluarnya anjuran dari pengurus Majelis Perwakilan PB Muhammadiyah MPD Yogyakarta kepada cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh daerah Yogyakarta agar membantu perjuangan Masyumi dalam Pemilu 1951 yang diorganisasikan dalam komando dan siasat dari KAPU Masyumi, memilih jago pemilih yang akan diajukan, dan menyediakan jago untuk DPR DIY mewakili kepentingan Masyumi (*Suara Muhammadiyah*, Radjab 1370 H / April 1951: hlm. 152).

Hasil Pemilu 1951 sebagai pemilu pertama yang dapat dianggap sebagai “percobaan demokrasi” bagi rakyat Yogyakarta dapat dilihat pada data berikut.

1. Masyumi mendapatkan suara 2753
2. PPDI mendapatkan suara 1115
3. PKABT mendapatkan suara 878
4. PNI mendapatkan suara 659
5. Partai Katholik mendapatkan suara 354
6. SSPP mendapatkan suara 314
7. PIR mendapatkan suara 311.

Sumber: Anonim, (1951b:24 - 25).

Dari hasil Pemilu 1951 tersebut diperoleh komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY sebagai berikut.

Tabel 2. Pembagian Kursi DPRD DIY Hasil Pemilu 1951

No	Nama Partai	Banyaknya Kursi yang Didapat dalam pembagian							Jumlah Kursi yang Diperoleh
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	Masyumi	16	-	1	-	-	-	1	18
2.	PPDI	6	-	-	1	-	-	-	7
3.	PKABT	5	-	-	-	-	-	-	5
4.	PNI	3	1	-	-	-	-	-	4
5.	Partai Katholik	2	-	-	-	-	-	-	2
6.	SSPP	1	-	-	-	1	-	-	2
7.	PIR	1	-	-	-	-	1	-	2
	Jumlah	34	1	1	1	1	1	1	40

Sumber: Anonim, (1951b:69).

Tampaknya, kemenangan Masyumi yang meraih mayoritas suara dalam pemilu 1951 (45 %) disebabkan oleh faktor partai ini lebih diuntungkan dengan sistem Pemilu yang bertingkat. Sebab dengan melalui Pemilu bertingkat, elit tokoh Masyumi yang menjadi wali pemilih atau jago lebih menarik untuk dipilih oleh rakyat pemilih ketimbang tokoh di luar Partai Masyumi. Elit tokoh Masyumi di Yogyakarta yang didominasi oleh anggota Muhammadiyah dan tergolong kaum santri yang terpelajar dinilai paling dapat menguasai massa.³⁷ Selain itu, dalam Pemilu 1951 Masyumi juga masih mendapatkan dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU) yang baru keluar dari Masyumi pada 1952.

Sebenarnya, sistem pemilu bertingkat yang diterapkan dalam Pemilu 1951 banyak menuai protes. Sebagian besar partai atau kumpulan partai yang mengikuti Pemilu 1951 merasa tidak puas bahkan kecewa, misalnya PNI, PIR, Partai Katholik, dan Parkindo. Hanya Masyumi yang merasa puas dan menilai Pemilu 1951 sudah berjalan dengan baik. Selain faktor keuntungan sistem Pemilu 1951, kemenangan Masyumi juga didorong oleh organisasi NU yang pada saat itu masih menjadi anggota istimewa Masyumi.

2. Pemilu 1955

Hasil Pemilu 1955 untuk wilayah DIY dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan jumlah pemilih, dapat ditunjukkan dari tabel di bawah ini

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara 5 Besar Partai Politik Pemilu 1955 untuk DPR Pusat

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Partai Peserta Pemilu				
				(1) PKI	(2) PNI	(3) Gerinda	(4) Masyumi	(5) NU
1.	Kotapraja Yogyakarta	243.276	137.830	43.842	21.839	611	18.027	2.387
2.	Sleman	485.895	245.313	36.655	47.353	38.646	30.805	27.634
3.	Bantul	430.560	249.815	34.770	41.138	23.554	38.151	38.436
4.	Kulonprogo	307.903	166.613	12.527	45.671	17.320	23.777	20.501
5.	Gunungkidul	477.708	251.298	101.351	34.159	51.168	16.180	5.802
	Jumlah total	1.945.342	1.050.869	229.145	180.160	131.299	127.540	94.760

Sumber: Soetarto (editor), (2009:136).

³⁷ Itu merupakan penilaian resmi pemerintah. Setelah Masyumi, yang paling bisa menguasai massa adalah PPDI. Hal itu wajar karena para lurah anggota PPDI hampir setiap hari bertemu dengan rakyat dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh untuk ditaati oleh massa. Mereka relatif lebih terpelajar dibanding rakyat yang menjadi bawahannya. Lihat Anonim, *Mimbar Pemilihan Umum ...*, op. cit., hlm. 80.

Kemudian untuk kotapraja Yogyakarta, hasil Pemilu 1955 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.³⁸

Tabel 4. Perolehan suara 5 Besar Pemilu 1955 untuk DPR

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Partai				
		(1) PKI	(2) PNI	(3) Masyumi	(4) Partai Katholik	(5) NU
1.	Gedongtengen	4253	1959	707	439	216
2.	Djetis	4526	2866	949	369	256
3.	Mergangsan	3667	1873	2035	461	141
4.	Mantra Djeron	3276	1539	833	478	221
5.	Gondomanan	2278	1116	2508	404	171
6.	Kraton	2950	2229	1636	714	120
7.	Ngampilan	2323	1577	2506	319	207
8.	Tegalredjo	3590	1879	213	368	267
9.	Gondokusuman	4614	2840	1209	997	345
10.	Wirobradjan	2398	1020	781	281	54
11.	Umbulhardjo	1714	700	1039	120	68
12.	Kotagede	2079	261	1364	24	78
Jumlah total		37665	19859	15780	4974	2144

Sumber: *Harian Suara Umat*, 13 Desember 1955.

Mengacu data di atas, ada beberapa catatan yang menarik untuk dikemukakan. Pertama, PKI menang di 10 dari 12 kecamatan atau *kemantren*, yakni di Gedongtengen, Djetis, Mergangsan, Mantri Djeron, Kraton, Tegalredjo, Gondokusuman, Wirobradjan, Umbulhardjo, dan bahkan di Kotagede yang notabene dikenal sebagai basis Muhammadiyah. Kedua, PNI meskipun menempati posisi kedua, namun tidak memenangkan perolehan suara di kecamatan manapun. Ketiga, Masyumi sekalipun menduduki peringkat ketiga tetapi menang di dua kecamatan, yakni Gondomanan dan Ngampilan. Fakta ini menunjukkan besarnya pengaruh Muhammadiyah yang berasal dari Kauman yang berada di Kecamatan Ngampilan. Keempat, Partai Katholik menempati posisi keempat dan bahkan perolehan suaranya jauh di atas NU yang menduduki peringkat kelima.

Tampaknya, suara yang diperoleh Masyumi sangat dipengaruhi oleh kehadiran Muhammadiyah. Muhammadiyah banyak memiliki amal usaha, terutama di bidang pendidikan, yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memobilisasi dukungan. Pada 1955, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta dapat ditunjukkan sebagai berikut: 14 cabang, 84 ranting, 1 PKU, 1 rumah yatim, 74 SR, 15 SMP, 1 Muallimin, 1 Muallimat, 1 Darul Ulum, 3 SGA, 3 SGB, 3 SMA, 1 Wustho, di samping beberapa Madrasah (*Surat Kabar Suara Ummat*, 1 Desember 1955).

Berkenaan dengan itu, dalam peringatan atau milad Muhammadiyah yang ke-43, Sri Sultan HB IX pada 30 November 1955 menyatakan bahwa Muhammadiyah diperlukan oleh masyarakat Indonesia semuanya. Faktor pendukung utamanya adalah karena Muhammadiyah telah memberikan sumbangsih yang besar dalam lapangan pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan. Kenyataan tersebut tidak dapat dianggap sepi atau dapat dilupakan begitu saja (*Surat Kabar Suara Ummat*, 1 Desember 1955).

³⁸ Hasil tersebut masih sementara, tetapi sudah di atas 87% suara yang masuk, jadi tidak akan ada perubahan yang berarti.

Hasil Pemilu 1955, sekalipun merupakan pemilu nasional, ternyata telah dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun DPRD Peralihan DIY dalam tahun 1956 sebagai kelanjutan dari DPRD DIY hasil Pemilu 1951 dengan masa kerja hingga tahun 1956. Komposisi DPRD Peralihan DIY yang selaras dengan hasil Pemilu 1955, tampak sebagai berikut: PKI sebagai partai pemenang pemilu mendapatkan 10 kursi, PNI 8 kursi, Gerinda 6 kursi, Masyumi 6 kursi, NU 4 kursi, dan ada lima partai yang masing-masing memperoleh 1 kursi, yakni PIR, Partai Katholik, IPKI, PRN, serta Partai Buruh. Masa jabatan DPRD Peralihan DIY ditetapkan sejak 24 Desember 1956 hingga 17 Naret 1958 (*Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950 1956, 1957: 15*).

Sementara komposisi anggota DPD DIY yang dipimpin oleh Sri Paduka (SP) Sultan HB IX sebagai Ketua dan SP Pakualam VIII sebagai wakil ketua adalah: BPH Surjodiningrat dari Gerinda (Seksi I), R. Moch. Hammam Hasjim dari Masyumi (Seksi II), Sutrisno dari PKI (Seksi III), Sunarjohadi dari PNI (Seksi IV), dan H.M. Irsjad dari NU (Seksi V) (*Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950-1956, 1957: 15*).

3. Pemilu 1957

Persebaran perolehan kursi di DPR Daerah di lingkungan wilayah Propinsi DIY sebagai hasil Pemilu 1957 dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 5. Perolehan Kursi Anggota Parlemen Kabupaten-Kota DIY Hasil Pemilu 1957³⁹

Asal Partai	Kota Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunungkidul
PKI	11	8	8	5	18
PNI	4	7	6	8	3
Gerinda	-	6	3	4	8
Masyumi	3	5	6	6	2
NU	1	5	5	4	1
Lain-lain	7	3	8	3	3
Total kursi	25	34	35	30	35

Sumber: Soetarto (editor), (2009:139).

Mencermati data di atas, PKI mampu meraih suara terbanyak dan mengalahkan rival-rivalnya, terutama PNI, Masyumi dan Gerinda. Dalam analisis harian *Kedaulatan Rakyat* (KR, 30 Oktober 1965), kemenangan PKI di Yogyakarta menandakan bahwa pada saat itu PKI berhasil mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat, khususnya dari kalangan petani dan buruh. Kehidupan sosial-ekonomi dua kalangan rakyat ini memang kurang baik dan dapat dikatakan paling menderita. Sementara itu, PKI menawarkan program-program yang sangat menjanjikan mereka untuk memperbaiki nasibnya. Tidak heran bila kondisi hidup yang buruk dan janji-janji yang baik itu memudahkan petani dan buruh berada di bawah pengaruh PKI.

Ada catatan yang penting mengenai usaha menyatukan kekuatan politik umat Islam guna menghadapi kampanye Pemilu 1957. Pada 2 Juli 1957 berlangsung acara serah terima pengurus pimpinan Masyumi wilayah DIY dari tangan R. Sunarjo Mangunpuspito kepada A.K. Muzakkir.⁴⁰ Acara serah terima kepemimpinan Masyumi tersebut berlangsung di balai pertemuan Masjid Agung Alun-alun Utara Yogyakarta, dan dipimpin oleh Ahmad Basuni.

³⁹ Ada sumber lain yang menyatakan bahwa perolehan kursi PKI dari seluruh perwakilan DPRD propinsi, kabupaten dan kota di wilayah DIY adalah 64 kursi, PNI 37 kursi, Masyumi 29 kursi, dan Gerinda 28 kursi. Lihat dalam Tim Penyusun, *Pemberontakan G 30 S/PKI 1965 di Yogyakarta dan Sekitarnya*, Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi DIY Proyek Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Bangsa, (2000), hlm. 3-4. Sementara dari data tabel 5 jika dihitung menunjukkan perolehan PKI 50 kursi, PNI 28 kursi, Gerinda 21 kursi, Masyumi 22 kursi, dan NU 16 kursi.

⁴⁰ Tampaknya itu merupakan periode kepemimpinan Prof A.K. Muzakkir yang kedua setelah menjabat sebagai Ketua Masyumi DIY dalam tahun 1951.

Dalam acara itu, ada tiga pembicara kunci, yakni: A.K. Muzakkir selaku Ketua Masyumi DIY yang baru, Mr. H. Kasmat sebagai anggota Konstituante, dan Achid Masduki selaku Ketua Fraksi Masyumi dalam DPRD DIY.⁴¹

A.K. Muzakkir menekankan bahwa semua partai Islam yang ada, terutama di wilayah DIY adalah Masyumi, NU dan PSII, pasti memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan kalimat Allah dan menjunjung tinggi agama Islam. Sehubungan dengan itu, A.K. Muzakkir mengajak kepada partai Islam yang ada untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, mengadakan kampanye bersama, jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka diupayakan agar tidak ada gesekan, dan tidak saling serang-menyenang. Ajakan Prof. A.K. Muzakkir untuk mengadakan kampanye bersama adalah sebagai berikut:

“Kalau dapat dilakukan kampanye bersama antara Masjumi, NU dan PSII, maka partai Islam akan mentjapai kemenangan jang besar” (Surat Kabar *Abadi*, 3 Juli 1957).

H. Kasmat sebagai anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi menjelaskan secara singkat perjuangan Masyumi dalam Konstituante. Beliau mengharapkan dukungan dan kerjasama agar Masyumi dan partai-partai Islam yang lain dapat mewujudkan amanat umat Islam Indonesia dalam pembentukan konstitusi Negara yang berdasarkan Islam. Selanjutnya, Achid Masduki selaku Ketua Fraksi Masyumi di DPRD DIY juga memaparkan perjuangan dan hasil kerja Masyumi yang cukup banyak bagi rakyat dan daerah Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan *honger odem* (HO), pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Surat Kabar *Abadi*, 3 Juli 1957).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa relasi Muhammadiyah dan Masyumi sudah terjalin sejak partai Islam tersebut didirikan pada 7 November 1945. Bahkan Muhammadiyah telah berjasa karena menyediakan tempat, yakni Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, untuk penyelenggaraan Kongres Umat Islam dan pendirian Masyumi. Selanjutnya, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Pasca keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952, dominasi politik Muhammadiyah terhadap Masyumi sangat besar, kalau tidak boleh dikatakan menentukan. Hal ini karena Muhammadiyah tampil menjadi tulang punggung utama Masyumi. Keadaan ini terjadi baik dalam tingkat nasional maupun wilayah seperti halnya di DIY. Di kalangan warga Muhammadiyah muncul adagium bahwa “Masyumi tempat berjuang di arena politik, sementara Muhammadiyah tempat beramal di arena dakwah.”

Kiprah tokoh-tokoh Masyumi yang notabene merupakan anggota Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang besar bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Beberapa tokoh Masyumi dan anggota Muhammadiyah yang berasal dari Yogyakarta, di antaranya: H.M. Rasyidi, H.A. Kahar Muzakkir, A.R. Baswedan, Amelz, R.H. Kasmat, R.H. Hadjid, dan Muh. Hasbi Assidiqy.

Di wilayah DIY, tokoh-tokoh Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah telah ikut aktif baik dalam pemerintahan (DPD) DIY dan Kotapraja Yogyakarta maupun dalam parlemen (DPRD). Beberapa dari mereka yang peranannya menonjol adalah Wiwoho Purbohadijoyo, Wazir Nurie, Mr. Kasmat, Moh. Mawardi, Dalhar Maksoem, dan Hammam Hasjim.

⁴¹ Selengkapnya hasil pertemuan Masyumi itu, periksa dalam Surat Kabar *Abadi*, 3 Juli 1957, dengan judul : “Masjumi-NU-PSII Pasti Menang Dengan Gerakan Kampanje Bersama untuk Pemilihan Umum DPRD”.

Dalam tiga kali perhelatan atau pesta demokrasi pada masa Demokrasi Liberal di wilayah DIY, yakni Pemilu 1951, 1955 dan 1957, Muhammadiyah baik secara organisatoris maupun secara personal telah memberikan dukungan kepada Masyumi. Dukungan itu terutama berupa anjuran agar warga Muhammadiyah lebih memilih Masyumi daripada partai yang lain.

B.Saran

Dokumentasi mengenai sejarah Muhammadiyah, dalam perspektif politik, terutama dalam kaitannya dengan Masyumi di wilayah Yogyakarta masih sangat sedikit atau langka. Bahkan historiografi mengenai sejarah Muhammadiyah yang ditinjau dari aspek politik untuk wilayah DIY juga hampir belum pernah dilakukan secara akademis. Berkenaan dengan itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-DIY, khususnya melalui Majelis Pustaka, hendaknya memiliki program untuk menyusun historiografi Muhammadiyah, dalam berbagai aspek tidak hanya politiknya, tetapi juga aspek yang lain seperti dakwah, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H.M. Muchlas. 2010. *Muhammadiyah Persamaan dan Kebersamaan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah The Political Behavior of Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, A. Mukti, 1997. "Sambutan", dalam Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amelz, 1952. *H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Amini, Mutiah, 2011. "Komunis di Kota Santri: Politik Lokal Kotagede pada 1950 1960-an," dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben. (penyunting). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV.
- Anonim, 1947. *Lahirnja Pantja-Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut Piagam Djakarta*. Djakarta: Tridjaja.
- Anonim, 1951a. *Kepartaian di Indonesia*. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- _____, 1951b. *Mimbar Pemilihan Umum Sekitar Pemilihan Umum di Djokjakarta*. Djakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Anonim, 1953. *Mana Tempatnja?*. Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kotapradja.
- Anonim, 1995. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Boedi Oetomo*. Jakarta: Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI
- Arsip Arsip Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah berupa Tjatatatan Pokok Ketua/Anggauta PB Muhammadiyah Tahun 1951*.
- Arsip Pengurus Besar Muhammadiyah Yogyakarta tersimpan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan kode RA 32b*.
- Arsip Tjatatatan Pokok untuk dokumentasi Pengurus Besar Muhammadiyah atas nama H. MH. Wazir Nurie*.
- Badawi, M. D., (penyalin), 2001. *Buku Putih Muhammadiyah Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1962 1965 dan 1965 1968*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Baswedan, A. R., 1971. "Kepada Buja A.R. St. Mansur Kepada Bapak A.R. Fachruddin," dalam *Suara Muhammadiyah (SM)*, Nomor 16 17, Tahun Ke-5.
- Benda, H. J., 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Elson, R. E., 2007. "Islam, Islamism, The Nation and The Early Indonesian Nationalist Movement," in *Journal of Indonesian Islam*, Volume 01, Number 02, December.
- Finch, S. and Daniel S. Lev, 1965. *Republic of Indonesia Cabinets, 1945 1965*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University.
- Gonggong, A., 2010. "Kasimo: Politik Bermartabat", dalam *Majalah Basis*, Nomor 11 12, Tahun Ke-59.
- Gottschalk, L., 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hadjid, R. H., 1934. *Guru Tabligh*. Jilid II. Poerbolingo: Boekhandel Persatuan.
- Harian Suara Umat*, 13 Desember 1955.
- Kartodirdjo, S., 1999. *Multi-dimensi Pembangunan Bangsa dan Etos Nasionalisme Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Maarif, A. S., 1988. *Islam dan Politik di Inonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Mulkhan, A. M., 1992. *Direktori Lembaga Dakwah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 1992 (Sebuah Petunjuk Praktis)*. Yogyakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah / Khotbah Agama Islam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nakamura, M., 1983. *Bulan sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta*. Terjemahan Yusron Asrofie. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noer, D., 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945 1965*. Bandung: Mizan.
- Nurhajarini, dkk., 2012. *Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Panitya Redaksi, 1952. *Ulang Tahun Ke-1 D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta*. Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- Sairin, W., 1995. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shiddiqi, N., 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, A., 1998. *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Siregar, I. F., 2008. "Pasang Surut peran Poltiik Masyumi Dalam Pemerintahan (1945 1960)", dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35, No. 1, Juni.
- Soetarto, E., (editor), 2009. *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950-1956*. Jogjakarta: Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1957.
- Surat Kabar Abadi*, 3 Juli 1957.
- Suratmin, 1989. *Abdul Rahman Baswedan Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Suryanegara, A. M., 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Suwarno, 2010. *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwarno dan Asep Daud Kosasih, 2014. *Relasi Agama dan Negara Dalam Skala Lokal Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMP Press.
- Suwarno, P. J., 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius.

- Syaifullah, 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsuddin, M., 2004. *Prof. Dr. H.M. Rasjidi Pemikiran dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Aziziah.
- Tim Penulis, 2000. *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun, 2000. *Pemberontakan G 30 S/PKI 1965 di Yogyakarta dan Sekitarnya*. Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi DIY Proyek Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Bangsa.